

Jurnal kajian Kesehatan Masyarakat	Vol. 2 No. 1	Edition: November 2020 – April 2021
	http://ejournal.delihusada.ac.id/index.php/JK2M	
Received: 13 Oktober 2020	Revised: 26 Oktober 2020	Accepted: 28 Oktober 2020

ANALYSIS OF FACTORS RELATED TO SMOKERS BEHAVIOR IN NO CIGARETTED AREA (KTR) IN HEALTH TRAINING UPT OF HEALTH DEPARTMENT NORTH SUMATERA PROVINCE 2020

Farida Lumbantobing, Irnawati Marsaulina, Peny Ariani

Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

e-mail: jhofay54@gmail.com

Abstract

Government agencies are the order established in no-smoking areas but no-smoking areas are still difficult to realize because there are still many employees in government agencies who smoke. The implementation of no-smoking areas in the workplace is expected to have a positive effect to change smoking behavior, such as reducing smoking during working hours, smoking in special places and efforts to stop smoking. The study aims to analyze the factors associated with employee smoking behavior in non-smoking areas at UPT Health Training North Sumatera Provincial Health Office in 2020. The research uses mixed methods with combination of models or sequential explanatory design methods. The population is all 42 male employees. Quantitative sampling techniques uses total sampling methods and qualitative using purposive sampling method. Quantitative data analysis with univariate analysis, bivariate with chi square and multivariate and qualitative using the interview method. The results of quantitative study that there is a relationship between knowledge of the regulations on non-smoking areas (0,002), knowledge about the dangers of cigarettes (0,001), signs of smoking (0,001), supporting facilities and infrastructure (0,000), superiors' support (0,001), application of sanctions (0,000)), the socialization of No-Smoking Areas (0.002) with smoking behavior of employees in no-smoking areas at UPT Health Training North Sumatera Provincial Health Office. And the conclusions of qualitative research that causes employees to smoke in areas without cigarettes is the lack knowledge of the employee about areas without cigarettes. It is recommended for employees to increase their knowledge about the dangers of cigarette content and knowledge of the No Smoking Area regulations.

Keywords : Smoking Behavior, Employees, No-Smoking Areas

1. PENDAHULUAN

Rokok dapat menyebabkan resiko bagi kesehatan individu maupun masyarakat karena mengandung zat yang bersifat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Hasil produk tembakau antara lain adalah rokok , digunakan

dengan cara dibakar, dihirup dan/atau dihisap asapnya. Ada beberapa macam rokok diantaranya cerutu, rokok putih , rokok kretek atau bentuk lainnya. Rokok dibuat dari tanaman *Nicotiana rustica* , *Nicotiana tabacum* dan jenis lainnya atau bahan sintesis yang memilikitar

dan nikotin, dengan ataupun tanpa bahan tambahan (PP RI, 2012).

Informasi dari *American Lung Association* mengatakan bahwa evaluasi yang dilakukan terhadap perokok yang telah berhenti merokok dalam waktu satu tahun sejak berhenti merokok, 90% diantaranya mengalami kekambuhan merokok atau kembali kepada kebiasaan lamanya dan merokok kembali (relapse). Artinya setelah melalui masa evaluasi satu tahun dari seluruh perokok yang telah berhenti merokok 10 % saja yang mampu tetap tidak merokok (Rosdiana, 2016).

Angka perokok saat ini di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Penggunaan rokok sebesar 36,4% atau melebihi sepertiga jumlah penduduk. Selain itu jumlah perokok baru pun meningkat tinggi. Survei indikator kesehatan nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2015 angka prevalensi perokok kurang dari 18 tahun terjadi peningkatan menjadi 8,8 % dari sebelumnya 7,2 %. Sementara pada tahun 2016 ditargetkan prevalensi merokok umur kurang dari 18 tahun adalah 6,4 % bahkan di tahun 2018 menjadi 5,4 %. Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa merokok memiliki peran terbesar timbulnya penyakit tidak menular antara lain jantung dan kanker. Seorang Perokok memiliki kerentanan dua sampai empat kali lipat menderita serangan (Afridha, 2018).

Penelitian Yulyana (2018) mengatakan bahwa belum efektifnya peraturan daerah, ditandai dengan kurangnya kepatuhan pegawai yaitu sebesar 30,4% akan kebijakan

kawasan tanpa rokok, ada pengaruh antara pengetahuan tentang bahaya rokok, pengetahuan tentang peraturan daerah, tanda larangan merokok, dukungan atasan, penerapan sanksi terhadap kepatuhan pegawai terhadap kebijakan kawasan tanpa rokok. Masih rendahnya kepatuhan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yaitu 30,4%. Faktor yang paling kuat berpengaruh terhadap kepatuhan pegawai pada penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok adalah penerapan sanksi (OR=8,695).

Berdasarkan Wawancara singkat peneliti pada tanggal 9 Desember 2019 dengan 10 orang pegawai laki-laki di UPT Pelatihan Kesehatan bahwa 7 orang mempunyai kebiasaan merokok di sembarang tempat lingkungan UPT Pelatihan Kesehatan. Dari 7 orang pegawai laki-laki tersebut mengutarakan bahwa kurang memahami manfaat dari kawasan tanpa rokok dan mempunyai kebiasaan mengisap rokok di sembarang tempat walaupun telah disediakan tempat kawasan merokok di lingkungan UPT Pelatihan Kesehatan, sarana prasarana tempat kawasan merokok yang kurang nyaman dan tidak disediakan asbak di tempat kawasan merokok, sanksi merokok ada tetapi dalam pelaksanaan sanksi tersebut kurang diterapkan bagi merokok di sembarang tempat dikarenakan pengawasan dari atasan yang kurang. Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik meneliti tentang analisis faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pegawai

pada kawasan tanpa rokok (KTR) di UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.

2. METODE

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian campuran (mixed methods) dengan memakai metode desain sequential explanatory atau metode kombinasi model. Ini merupakan penggabungan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara bertahap. Penelitian kuantitatif dilakukan terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan metode kualitatif.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai laki-laki di UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang aktif pada bulan Januari 2020 sejumlah 42 orang terdiri dari 25 orang PNS dan 17 orang non PNS.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan total sampling. Adalah seluruh pegawai UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 42 orang.

Penelitian ini menggunakan tiga metode analisa yaitu analisa univariat, bivariat (dengan uji Chi-Square test) dan analisa multivariat (dengan regresi logistik berganda).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Kuantitatif

Analisis Univariat

Tabel 1.
Distribusi Frekuensi Karakteristik Pegawai

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
≤ 35 tahun	17	40.5
36-45 tahun	5	11.9
≥ 46 tahun	20	47.6

Jumlah Lama Bekerja	42	100,0
	Frekuensi	Persentase (%)
≤ 10 tahun	14	33.3
11-20 tahun	14	33.3
≥ 21 tahun	14	33.3
Jumlah Pendidikan	42	100,0
	Frekuensi	Persentase (%)
Menengah	24	57.1
Tinggi	18	42.9
Jumlah	42	100,0

Berdasarkan tabel 1. diatas bahwa umur pegawai mayoritas terdapat pada kategori ≥ 46 tahun yaitu 20 orang (47,6%), lama bekerja pegawai terdapat pada kategori ≤ 10 tahun yaitu 14 orang (33,3%), 11-20 tahun yaitu 14 orang (33,3%) dan ≥ 21 tahun yaitu 14 orang (33,3%), pendidikan pegawai mayoritas terdapat pada kategori menengah yaitu 24 orang (57,1%).

Tabel 2.
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Tentang Peraturan Kawasan Tanpa Rokok

Pengetahuan Tentang Peraturan Kawasan Tanpa Rokok	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	10	23.8
Kurang	32	76.2
Jumlah	42	100,0

Berdasarkan tabel 2. diatas bahwa pengetahuan tentang peraturan kawasan tanpa rokok mayoritas terdapat pada kategori kurang yaitu 32 orang (76,2%).

Tabel 3.
Distribusi Frekuensi Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan Prasarana Penunjang	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	14	33,3
Kurang	28	66,7
Jumlah	42	100,0

Berdasarkan tabel 3.diatas bahwa sarana dan prasarana penunjang mayoritas terdapat pada kategori kurang yaitu 28 orang (66,7%).

Tabel 4.
Distribusi Frekuensi Penerapan Sanksi

Penerapan Sanksi	Frekuensi	Persentase (%)
Dilaksanakan	14	33,3
Tidak dilaksanakan	28	66,7
Jumlah	42	100,0

Berdasarkan tabel 4.diatas bahwa penerapan sanksimayoritas terdapat pada kategori tidak dilaksanakan yaitu 28 orang (66,7%).

Analisa Bivariat

Tabel 5.
Distribusi Hubungan Faktor Pengetahuan Tentang Peraturan Kawasan Tanpa Rokok Dengan Perilaku Merokok Pegawai Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Pengetahuan Tentang Peraturan Kawasan Tanpa Rokok	Perilaku Merokok Pegawai Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR)			P Value
	Baik	Kurang	Total	
Baik	8	2	10	0,002
Kurang	7	25	32	
Jlh	15	27	42	

Berdasarkan tabel 5. diatas bahwa pengetahuan tentang peraturan kawasan tanpa rokok kategori baik yaitu 10 orang dengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) kategori baik yaitu 8 orang dan kurang yaitu 2 orang. Berdasarkan hasil uji chi square diperoleh nilai $p=0,002 < p=0,05$ artinya ada hubungan faktor pengetahuan tentang peraturan kawasan tanpa rokok dengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) di UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Penelitian Amalia (2012) mengatakan bahwa dari 56 responden yang patuh terhadap peraturan 20 diantaranya mengetahui tentang peraturan Kawasan Tanpa Rokok dan 30tidak mengetahuinya. Sedangkan 44 responden yang tidak patuh, 9 orang diantaranya mengetahui peraturan kawasan tanpa rokok dan 35 lainnya tidak mengetahuinya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada hubungan faktor pengetahuan tentang peraturan kawasan tanpa rokok dengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR). Pengetahuan mempengaruhi perilaku seseorang dalam melaksanakan perilaku merokok pegawai. rokok mempengaruhi perilaku merokok seseorang.

Tabel 6.
Distribusi Tabulasi Silang Hubungan Faktor Sarana dan Prasarana Penunjang Dengan Perilaku Merokok Pegawai Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sarana dan Prasarana Penunjang	Perilaku Merokok Pegawai Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR)			P Value
	Baik	Kurang	Total	
Baik	11	3	14	0,000
Kurang	4	24	28	
Jumlah	15	27	42	

Berdasarkan tabel 6. diatas bahwasarana dan prasarana penunjangkategori baik yaitu 14 orang dengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) kategori baik yaitu 11 orang dan kurang yaitu 3 orang. Dari hasil uji chi square diperoleh nilai $p=0,000 < p=0,05$ artinya ada hubungan faktor sarana dan prasarana penunjangdengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) di UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Penelitian Hendry (2016) mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh PT KAI adalah area merokokyang ada di sisi luar stasiun, dan area merokok yang berupa gerbong untuk memfasilitasi penumpang kereta yang ingin merokok. Smoking area difasilitasi dengan berbagai fasilitas yaitu meja 1 buah, asbak 5 buah, kursi 10 buah, serta pengisap asap satu buah yang berfungsi agar asap tidak keluar ruangan dan tidak mengganggu pengguna diluar ruangan smoking area dan termasuk perokok yang ada didalam.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada hubungan faktor sarana

dan prasarana penunjangdengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR). Sarana dan prasarana penunjang mempengaruhi perilaku merokok pegawai disembarang tempat karena disediakan tempat untuk merokok. Pegawai yang merokok pada kawasan yang telah ditetapkan.

Tabel 7.
Distribusi Tabulasi Silang Hubungan Faktor Penerapan Sanksi Dengan Perilaku Merokok Pegawai Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Penerapan Sanksi	Perilaku Merokok Pegawai Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR)			P Value
	Baik	Kurang	Total	
Baik	12	2	14	0,000
Kurang	3	25	28	
Jumlah	15	27	42	

Berdasarkan tabel 7. diatas bahwapenerapan sanksikategori dilaksanakan yaitu 14 orang dengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) kategori baik yaitu 12 orang dan kurang yaitu 2 orang. Berdasarkan hasil uji chi square diperoleh nilai $p=0,000 < p=0,05$ artinya ada hubungan faktor penerapan sanksidengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) di UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Penelitian Yulyana (2015) bahwa dari 158 orang yang mengatakan penerapan sanksi kategori tidak ada 82 orang dengan kepatuhan kawasan tanpa rokok kategori tidak patuh 74 orang (90,2%) dan patuh 8 orang (9,8%) sedangkan penerapan sanksi kategori ada 76 orang dengan

kepatuhan kawasan tanpa rokok kategori tidak patuh 36 orang (47,4%) dan patuh 40 orang (52,6%).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa ada hubungan faktor penerapan sanksidengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR). Penerapan sanksi bagi pegawai dapat mengatur dan mengubah perilaku merokok pegawai.

Analisis Multivariat

Variabel yang dominan berhubungan dengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok adalah penerapan sanksi dengan nilai ($p = 0,014$, $\text{Exp}(B) = 130,898$ 95% CI (2,736– 6262,893) artinya bahwa pegawai yang melaksanakan penerapan sanksi berpeluang 130 kali mempunyai perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) yang baik dibandingkan dengan pegawai yang tidak melaksanakan penerapan sanksi.

Kualitatif

Penyebab Pegawai Merokok Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai kawasan tanpa rokok menjadi penyebab perilaku merokok disembarang tempat dan sebagian pegawai yang merokok merupakan perokok aktif sehingga sulit untuk menghentikan perilaku merokok pegawai

Pengetahuan merupakan hal penting untuk membentuk bahkan mengubah perilaku seseorang. Dengan pemahaman yang baik

kemungkinan menciptakan perilaku merokok pegawaidi kawasan tanpa rokok (KTR) akan baik.

Faktor Yang Paling Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pegawai Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sanksi ditemukan sebagai hal yang paling berhubungan dengan perilaku merokok. Sanksi belum diterapkan bagi pegawai yang merokok pada kawasan tanpa rokok (KTR), hanya berupa sanksi lisan belum adanya sanksi administrasi. Apabila ada sanksi pegawai melaksanakan apa yang diperintahkan. Dukungan pimpinan dalam memberikan sanksi administrasi juga mempengaruhi perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR).

Penerapan sanksi pada pegawai sangat mempengaruhi perilaku merokok pegawai. Perilaku merokok pegawai diatur dengan adanya penerapan sanksi tentang merokok pada kawasan tanpa rokok (KTR). Cara Mengatasi Perilaku Merokok Pegawai Pada Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Cara mengatasi perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu penerapan sanksi pada pegawai. Pegawai yang merokok merasa bahwa merokok adalah hak mereka. Belum adanya dukungan dari Dinas kesehatan dalam menerapkan sanksi administrasi bagi pegawai yang merokok misalnya berupa peraturan tertulis tentang KTR.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa cara mengatasi perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu penerapan sanksi pada pegawai. Adanya

komitmen dalam merealisasikan kawasan tanpa rokok (KTR) demi peningkatan kesehatan serta mendukung terlaksananya kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) oleh seluruh informan.

4. KESIMPULAN

Kuantitatif

- a. Ada hubungan faktor pengetahuan tentang peraturan kawasan tanpa rokok, sarana dan prasarana penunjang, dan penerapan sanksi, dengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) di UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.
- b. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) di UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 adalah penerapan sanksi

Kualitatif

- a. Pengetahuan yang kurang menjadi penyebab pegawai merokok di kawasan tanpa rokok (KTR)
- b. Sanksi adalah yang paling berhubungan dengan perilaku merokok pegawai.
- c. Cara mengatasi perilaku merokok pegawai pada kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu penerapan sanksi pada pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.(2012).PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK PADA PERKANTORAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA. www.fakta.or.id/.../Pergub-Sumut-No-35-Tahun-2012-ttg-KTR-pd-perkantoran-di-lin. Diakses tanggal 14 Oktober 2019.
- Rosdiana, Mapeaty Nyorong, & Ida Leida M. Thaha. (2016). FAKTOR YANG BERTHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KEKAMBUHAN MEROKOK DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR. [pasca.unhas.ac.id > jurnal > files](http://pasca.unhas.ac.id/jurnal_files). Diakses tanggal 18 Oktober 2019.
- Afridha Noor Pewara, (2018). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK DI DESA BONE-BONE KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG MAKASAR. eprints.unm.ac.id/10750/1/Jurnal.pdf. Diakses tanggal 11 Oktober 2019.
- Yulyana Kusuma Dewi, Fauziah Nuraini K, & Andries Lionardo.(2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEGAWAI TERHADAP KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKOTA PALEMBANG. SRIWIJAYA JOURNAL OF MEDICINE,

VOLUME 1 NO. 1, Januari 2018,
hal 8-15.
<https://jurnalkedokteranunsri.id>
> [UnsriMedJ](#) > [article](#) >
[download](#). Diakses tanggal 21
Oktober 2019.

Amalia Puswitasari. (2012). FAKTOR
KEPATUHAN MAHASISWA DAN
KARYAWAN TERHADAP
PERATURAN KAWASAN TANPA
ROKOK DI LINGKUNGAN
KAMPUS FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO.
eprints.undip.ac.id. Diakses
tanggal 12 Maret 2020.

Hendry Eka Prasetya , Ari Subowo,
&Aufarul Marom. (2016).
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
KAWASAN TANPA ROKOK DI
STASIUN TAWANG KOTA
SEMARANG.
<https://media.neliti.com> >
[media](#) > [publications](#) > [97562-](#)
[ID-implementasi-kebijakan-](#)
[kawasan-tanpa-rokok](#). Diakses
tanggal 8 Desember 2019.